

## Pertanian Lokal Berkelanjutan: Kemandirian Petani Dari Subsidi dan Korporasi

Gusti Nur Asla Shabia

### Poin-poin Penting:

- Pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah untuk mempermudah petani memperoleh sarana demi kelancaran produksinya. Namun, petani sendiri menjadi tergantung dengan skema pupuk bersubsidi yang memiliki berbagai masalah, terutama karena rantai nilai dari hulu ke hilir yang terlalu panjang dan rentan dipermainkan oleh mafia-mafia pupuk.
- Petani membutuhkan sebuah skema yang dapat memperkuat kemandirian dan kedaulatannya, bukan lagi melalui pupuk bersubsidi atau Food Estate. Sistem pangan lokal dan pertanian berkelanjutan dinilai sebagai solusi yang paling tepat, karena dapat membebaskan petani dari rantai nilai yang panjang, kerusakan tanah yang berbauah pada ketergantungan pupuk lagi, dan cengkraman agribisnis dengan iming-iming solusi.

### Pengantar

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebijakan subsidi dalam sektor pertanian, termasuk di antaranya pupuk. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020, pengadaan pupuk bersubsidi diselenggarakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, sementara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 menimbang fungsi pupuk untuk meningkatkan produksi.

Subsidi pupuk telah eksis sejak adanya Revolusi Hijau pada pemerintahan Orde Baru, meskipun saat itu tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga untuk memodernisasi pertanian (KPK, 2017). Sebelumnya, para petani hanya bergantung pada pupuk alami seperti pupuk kandang saja. Kebijakan pupuk bersubsidi masih diselenggarakan hingga kini, di mana skema pupuk bersubsidi yang dilaksanakan adalah pemerintah menanggung selisih antara harga pokok produksi pupuk dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan (FISIPOL UGM, 2020a). Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani membeli pupuk bersubsidi sesuai HET yang ditetapkan setiap tahunnya<sup>1</sup>. Dalam menanggung pembiayaan untuk pupuk bersubsidi ini, pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar setiap tahun, untuk tahun ini saja sebesar Rp25,27 triliun, meskipun turun 4,3 triliun dari anggaran tahun 2020<sup>2</sup>.

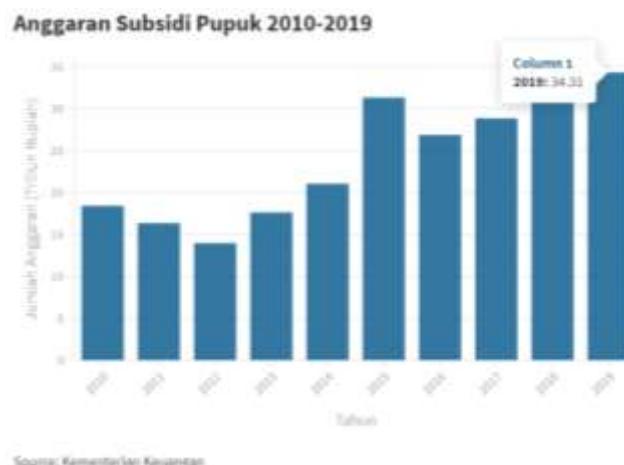


Diagram 1. Anggaran Pupuk dari 2010-2019 (Thomas, 2021)<sup>3</sup>

“Dicekoki” pupuk bersubsidi selama kurang lebih 51 tahun<sup>4</sup>, telah membuat petani mengalami ketergantungan terhadap subsidi pupuk. Hal ini berisiko menaruh petani dalam kerentanan ketika terjadi disrupsi dalam subsidi pupuk.

Padahal, banyak permasalahan yang terjadi dalam kebijakan pupuk bersubsidi. Beberapa kajian telah menulis soal permasalahan dalam segala aspek pelaksanaan program pupuk bersubsidi, mencakup pendataan, penganggaran, distribusi, dan pengawasan, seperti laporan penelitian PATTIRO-USAID (2011), policy brief FISIPOL UGM (2021), dan laporan penelitian dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (2018). Adapun, salah satu permasalahan yang paling mengemuka dan diyakini sebagai inti dari permasalahan pupuk adalah rantai nilai yang panjang, baik dalam hal pengajuan alokasi pupuk dan distribusi pupuk yang berisiko dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu, seperti mafia-mafia pupuk.

Kombinasi dari dua hal ini adalah kelangkaan pupuk subsidi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan petani. Konsekuensinya, petani harus saling berebut pupuk bersubsidi yang langka, dan mereka yang tidak memperolehnya, yang juga tak bisa membeli pupuk non-subsidi karena harga yang jauh lebih mahal dari HET, harus menghadapi kegagalan untuk menanam pada waktu yang tepat atau menanggung kerugian karena pendapatan dari hasil produksi mereka tak menutup biaya produksi yang telah dikeluarkan<sup>5</sup>.

Soal pupuk ini telah ramai diperbincangkan sejak Joko Widodo mempersoalkan produktivitas hasil pertanian yang berbanding terbalik dengan anggaran subsidi pupuk yang besar<sup>6</sup>. Banyak orang yang mengestimasikan bahwa pupuk bersubsidi akan semakin dikurangi dan bisa saja suatu saat dihentikan. Hal ini bukannya tidak mungkin, karena Asian Development Bank (2019) pernah meluncurkan suatu penghitungan bahwa penghentian subsidi pupuk dan pengalokasiannya ke anggaran untuk riset dan pengembangan teknologi malah akan membuka peluang pada peningkatan produktivitas.

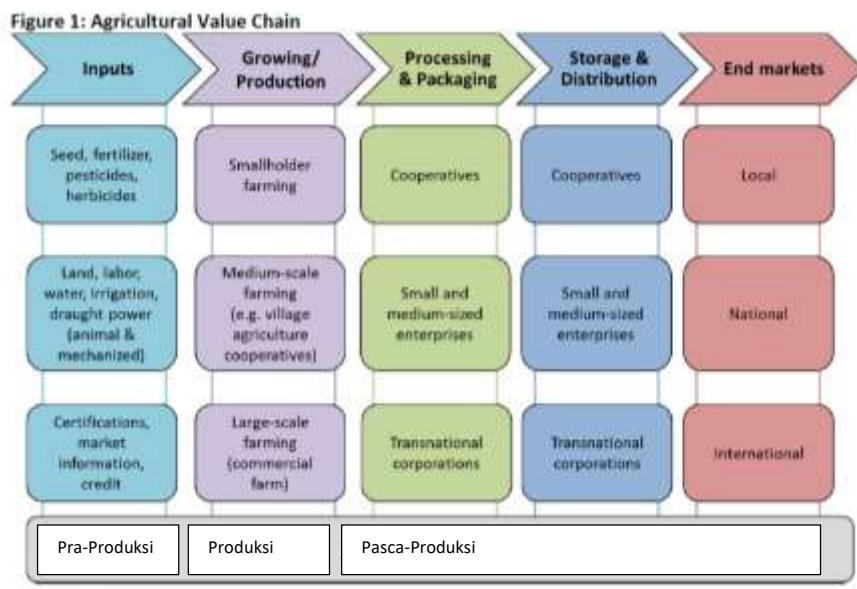
Patut diakui, bahwa kebijakan pupuk bersubsidi dapat meringankan ongkos produksi petani sekaligus melindungi petani ketika mengalami kegagalan panen<sup>7</sup>, sehingga penghentian subsidi dapat memengaruhi petani sebegitu berat. Namun, melihat kasus-kasus kelangkaan pupuk semakin *santer*, kami melihat bahwa urgensi petani untuk berdaulat dan lepas dari ketergantungan bantuan yang rentan dipermainkan semakin mendesak. Salah satu solusi ini adalah sistem pangan lokal dan pertanian berkelanjutan.

Lantas, bagaimana sistem pangan lokal dan pertanian berkelanjutan akan membuat petani mandiri, termasuk lepas dari ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi?

## Apa Itu Sistem Pangan Lokal dan Pertanian Berkelanjutan?

“Sistem pangan lokal” dan “pertanian berkelanjutan” memang merupakan dua istilah yang berbeda. Sistem pangan lokal lebih menekankan pada sistem pangan yang terdiri dari proses produksi (termasuk rantai pasok produksi untuk benih dan pupuk), pengolahan, distribusi, konsumsi, hingga pengelolaan sampah pangan, **yang terpusat dalam lingkup dan jarak tertentu**, misalkan mengacu pada sebuah komunitas atau daerah tertentu (Hendrickson, 2015; Community Wealth, 2020). Sistem pangan lokal dengan rantai suplai yang pendek, tidak hanya menekankan usaha memperpendek *jarak* dalam sistem pangan, tetapi juga “memendekkan” *jumlah* institusi yang terlibat (Kneafsey et al., 2013). Sistem pangan lokal idealnya memperpendek jarak baik dalam bagian pra-produksi maupun pasca produksi (lihat Diagram 2). Sehingga, asumsinya, input diperoleh dari produsen pupuk maupun benih lokal, sementara

pemrosesan, pengemasan, distribusi, ditanggung oleh aktor-aktor lokal atau bahkan oleh produsen dan konsumen itu sendiri.



**Diagram 2.** Tipikal Rantai Nilai Pertanian Konvensional (Non-Lokal)  
Sumber: Abdulsamad, et al., 2013

Sedangkan, pertanian berkelanjutan, dikenal juga dengan nama pertanian alami atau pertanian organik, menekankan pada **cara bertanam** yang holistik yang mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem secara *alami*, tidak menggunakan pupuk, benih, bahan-bahan yang diproduksi secara artifisial (misal lewat rekayasa genetika) atau mengandung zat kimia (Batara dan Krisnayanti, 2005; dalam Bina Desa, 2016). Ada beberapa perbedaan signifikan antara pertanian alami dan pertanian konvensional (merujuk pada pertanian yang masih memakai bahan-bahan kimia sebagai input pertanian), dijelaskan dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Perbedaan Pertanian Alami dan Pertanian Konvensional (Non-Alami)

Pertanian Konvensional/Non Alami	Pertanian Alami
Menggunakan mikroorganisme dari luar daerah	Menggunakan mikroorganisme lokal atau <i>indigenous microorganisms</i> (IMOs)
Menggunakan pupuk kimia	Menggunakan pupuk alami berupa nutrisi sesuai siklus tanaman/pupuk dari ternak (pupuk kandang)
Pengolahan tanah secara mekanik (menggali terlalu dalam)	Menggunakan pembajak alami (seperti bakteri aerobik dan anaerobik, jamur, cacing), bisa menggunakan <i>green manure</i> dan beberapa mengintegrasikan pemberian
Teknologinya cukup mahal	Menggunakan mikroba, biaya sangat sedikit atau tidak perlu biaya
Tanaman rapat dan monokultur	Tanaman jarang dan beragam
Menggunakan pestisida untuk membunuh hama	Menggunakan input nutrisi untuk menghalau hama dari fermentasi buah (FPJ) atau turut menanam tanaman-tanaman yang atraktif bagi hama tertentu

Data dari Bina Desa (2016) dengan beberapa perubahan

Meskipun berbeda, ketika dikombinasikan, kedua hal ini sama-sama menekankan pada cara alternatif untuk memproduksi suatu pangan yang lebih mandiri dan berdaulat, tidak seperti sistem pangan dan pertanian konvensional.

Idealnya, karena sistem pangan lokal menekankan pada pengaturan ulang sebuah ruang dalam keseluruhan sistem pangan (*re-spatialization*) (Kalfagianni dan Skordili, 2018), termasuk dalam hal penyediaan input-input pertanian seperti pupuk dan “pestisida” di bagian hulu, maka pupuk dan pestisida pun harus diperoleh, atau bahkan diproduksi, secara lokal.

Ketika suplai input pertanian secara lokal ini diselaraskan dengan prinsip pertanian alami, maka petani tidak lagi memakai logika *mencari produksi pupuk kimia yang ada dalam lingkup lokal dari pihak lain*, atau malah memakai pupuk organik semata—menilik pupuk organik merupakan salah satu bagian dari pupuk bersubsidi—tetapi, petani *benar-benar* memproduksi sendiri pupuknya melalui pemakaian bahan-bahan alami seperti pupuk kandang, atau malah menggunakan nutrisi dari bahan-bahan yang tersedia dengan bebas atau murah di lingkungan sekitar. Praktik ‘alami’ ini juga terwujud dalam penggunaan benih, pengusir hama, dan pengaturan tanaman seperti yang dijelaskan pada Tabel 1. Intinya, petani tidak lagi terjalin dalam skema pasar ataupun pemerintah yang kepengaturannya tidak bisa ia kendalikan.

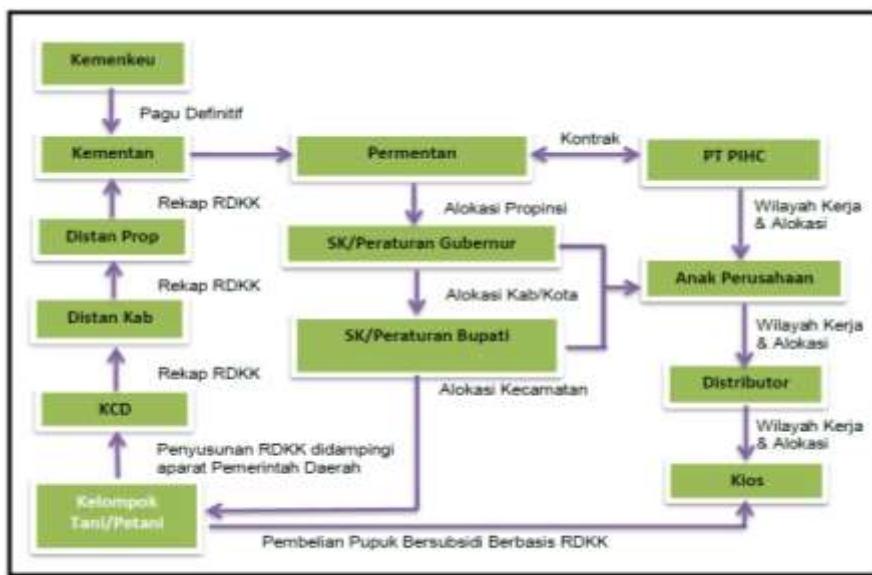
Dari sini, kita kemudian dapat melihat bagaimana kemandirian petani dapat terwujud dengan adanya pertanian yang lokal dan berkelanjutan.

### **Pertanian Lokal nan Berkelanjutan: Mandiri dari Rantai Nilai yang Panjang**

Pertama, dengan pertanian lokal dan berkelanjutan, petani dapat bebas dari rantai nilai penyediaan subsidi pupuk yang kompleks dan panjang.

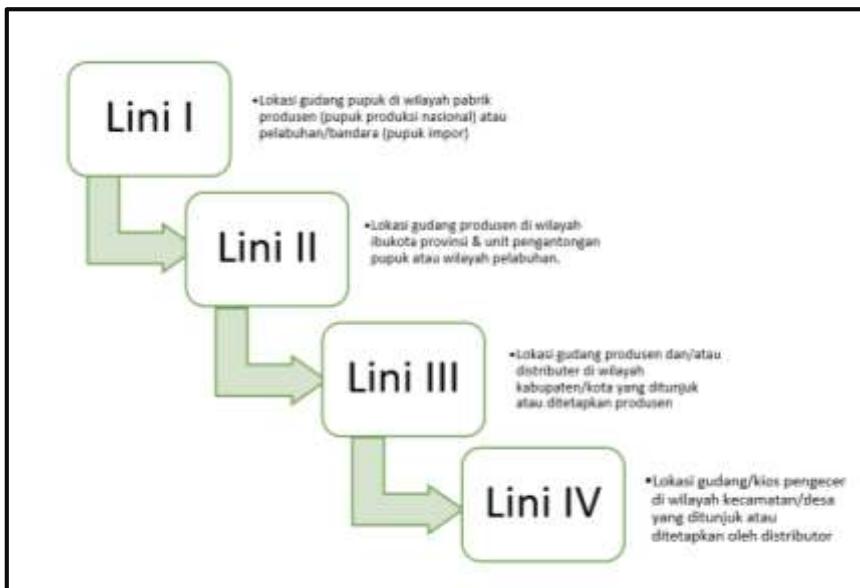
Dilansir dari laporan yang disusun oleh KPK yang mengkaji subsidi dalam sektor pertanian, rantai penyediaan pupuk terdiri dari alur yang cukup kompleks dengan melibatkan banyak institusi. Dalam melaksanakan kebijakan pupuk bersubsidi ini, institusi yang terlibat antara lain ada di tingkat pusat, seperti: DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan; di tingkat daerah, seperti: Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan korporasi pemerintah seperti PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) serta produsen-produsen pupuk subsidi yang berjejaring dengan PIHC (KPK, 2017)<sup>8</sup>.

Sementara, dalam penyediaannya, tahapan pengajuan dan penyaluran pupuk juga melalui berbagai tahapan dan lini, seperti yang digambarkan pada Diagram 2 (Alur Perencanaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi) dan Diagram 3 (Lini I hingga Lini IV Penyaluran Pupuk Bersubsidi).



Sumber : data diolah, 2016

**Diagram 3.** Alur Perencanaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KPK, 2017)



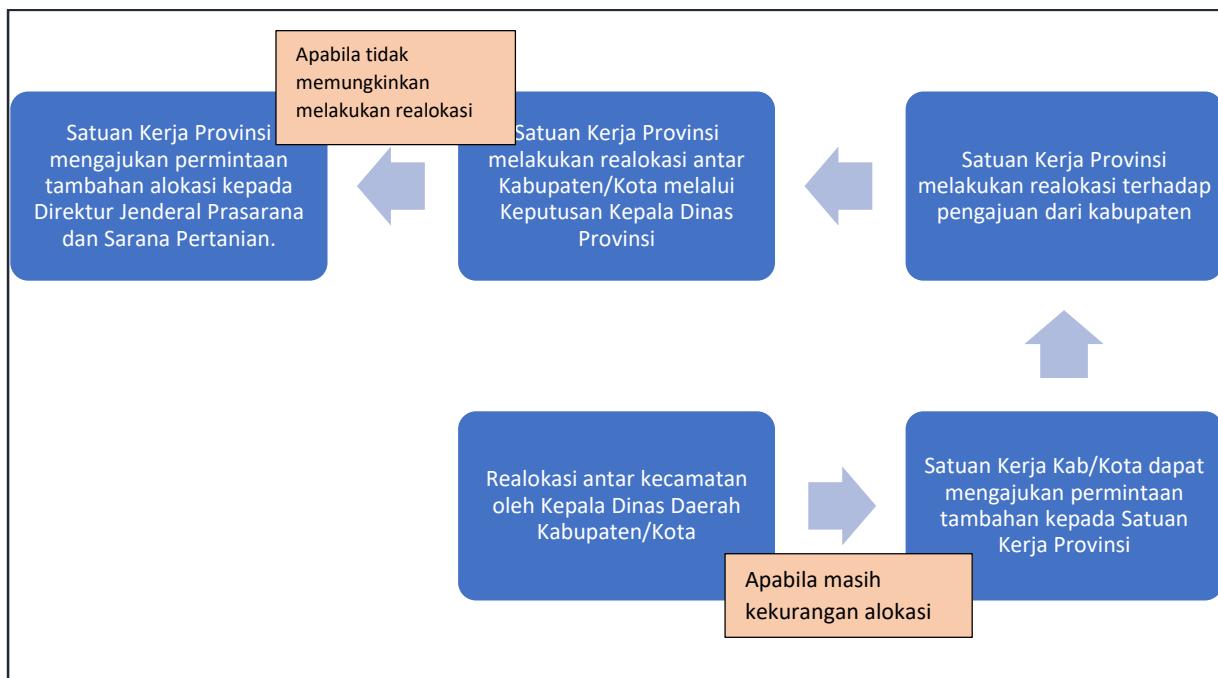
**Diagram 4.** Lini I hingga IV Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KPK, 2017)

Konsekuensinya? Keterlibatan banyak institusi berpeluang besar pada kasus suap dan korupsi. Kita tentunya masih ingat pada tahun 2019 lalu, Komisi IV DPR RI, Bowo Sidik Pangarso, terjerat dalam kasus suap distribusi pupuk yang melibatkan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), perusahaan yang menyewakan kapal untuk mendistribusi pupuk dari PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog)<sup>9</sup>. Pada 2019 lalu, terdapat sekitar 782 perusahaan mafia pupuk yang sedang menjalani proses hukum<sup>10</sup>, menunjukkan realitas bahwa ada tangan-tangan licik yang mengendalikan suplai pupuk hingga menimbulkan kelangkaan di *end user*, yakni petani.

Sementara, rantai yang panjang memiliki konsekuensi terjadinya ketidaksinkronan data kebutuhan dan penyaluran, serta penyelewengan dalam distribusi seperti yang didokumentasikan PATTIRO (2011), terdiri dari: penimbunan, penjualan pupuk dengan harga di atas HET, penjualan di luar wilayah distribusi, pengecer yang tidak resmi, hingga penggantian

kemasan pupuk bersubsidi menjadi pupuk non-subsidi yang kemudian dijual dengan harga pupuk non-subsidi<sup>11</sup>. Rantai yang panjang juga berimplikasi pada pupuk yang sampai terlambat di tangan petani.

Petani yang menghadapi kelangkaan pupuk, juga harus menghadapi proses yang berbelit-belit dalam mengajukan realokasi. Dari Pasal 11 Permentan No. 49/2020, realokasi memang bisa dilakukan ketika terjadi kelangkaan atau kelebihan pupuk di satu wilayah. Namun, pengajuan realokasi ini membutuhkan waktu dan masih harus dilakukan lintas-institusi yang berlapis lagi. Mekanisme yang diterangkan dalam *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2020 (Revisi)*, kurang lebih diterangkan dalam diagram di bawah ini:



**Diagram 5.** Mekanisme Pengajuan Realokasi

Diagram di atas pun masih diiringi dengan catatan, bahwa kondisi yang memungkinkan adanya realokasi adalah kekurangan pupuk yang disebabkan karena tingginya kebutuhan pupuk petani. Petunjuk teknis ini belum memberikan skema pengajuan di luar kelangkaan karena faktor lain, seperti penyelewengan dalam rantai distribusi tadi.

Berlawanan dengan rantai nilai penyediaan pupuk yang panjang, telah dikatakan bahwa pertanian lokal dan berkelanjutan berarti petani memproduksi pupuk sendiri dengan memaksimalkan kekayaan alam di sekitarnya. Ini berarti, untuk memproduksi satu pupuk, kemungkinan besar petani hanya akan bersentuhan dengan orang-orang yang memiliki atau menjual bahan-bahan alami tertentu, atau malah tidak sama sekali. Ancaman keterlambatan memupuk lahan yang berujung pada kegagalan panen juga bisa ditekan dengan maksimal, karena petani sendiri yang mengatur waktu produksi dan kesiapan pupuknya.

### **Pertanian Lokal nan Berkelanjutan: Mandiri Tanpa Konsekuensi Kerusakan Alam**

Kedua, dengan pertanian lokal dan berkelanjutan, petani dapat menghindari penggunaan input pertanian kimiawi yang merusak tanah dan mematikan mikroorganisme penting yang ada di dalam tanah, karena nutrisinya pun alami.

Dikatakan Henry Saragih, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI), persoalan tidak meningkatnya produksi pertanian padahal petani menggunakan jumlah dan volume pupuk yang sama untuk satu kali tanam dapat terjadi karena tanah sudah jenuh. Bahan kimia yang terkandung di dalamnya telah membuat tanah menjadi tak subur, keras, dan tandus<sup>12</sup>. Pupuk organik memang termasuk dalam skema subsidi, tetapi pengadaannya yang diserahkan ke perusahaan yang ditunjuk pemerintah, juga skemanya yang masih berlapis seperti diterangkan subab sebelumnya, pupuk organik bersubsidi dari pemerintah bukanlah opsi yang baik.

Hal ini bagaikan lingkaran setan; kerusakan tanah ini menstimulasi peningkatan kebutuhan pupuk oleh petani agar tanamannya dapat tetap bertumbuh, dan semakin rusaklah tanah yang petani gunakan. Akibatnya, ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi semakin besar.

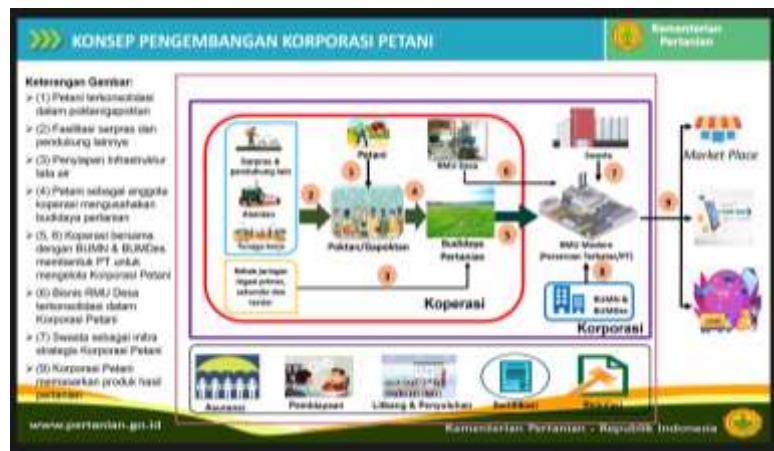
### **Pertanian Lokal nan Berkelanjutan: Mandiri dari Cengkraman Industri dan Agribisnis**

Ketiga, dengan pertanian lokal dan berkelanjutan, petani dapat membangun kesejahteraannya sendiri tanpa memerlukan bantuan pemerintah dan korporasi. Telah kita lihat bahwa Presiden Joko Widodo mengarahkan bahwa solusi meningkatkan produktivitas bukan lagi ketersediaan pupuk, tetapi pembangunan pertanian skala luas dan pemakaian teknologi, yang mengarah pada rencana pemerintah membangun Food Estate<sup>13</sup>.

Dari pernyataan Joko Widodo, kami melihat bahwa ada indikasi pemerintah akan mencabut subsidi pupuk yang memakai anggaran yang besar setiap tahunnya. Hal ini merupakan tindakan yang bukannya tidak mungkin untuk dilakukan. Laporan dari Asian Development Bank (ADB) mengestimasikan bahwa meskipun penghapusan subsidi pupuk dapat berdampak langsung pada penurunan hasil panen sebesar 2,45% pada tahun 2025 yang bertahan hingga 2045, penghapusan subsidi dengan investasi kembali dalam penelitian dan pengembangan—utamanya dalam teknologi dan irigasi—diproyeksikan akan mengubah situasi perdagangan menjadi lebih baik (2020: 75). Masih dari ADB, alasan bahwa sektor pertanian Indonesia tetap tidak efisien dan kompetitif disebabkan oleh adanya subsidi pupuk dari pemerintah, yang menghalangi sistem harga yang dikendalikan pasar untuk berjalan dengan efisien dalam produksi dan penggunaan pupuk (ibid: 73). Analisis dari Asian Development Bank (ADB) ini menjadi menarik ketika dibenturkan dengan fakta bahwa pemerintah masih memiliki utang sejumlah Rp 13,8 triliun terkait subsidi pupuk, akumulasi dari utang sejak 2017 hingga 30 September 2020 lalu<sup>14</sup>.

Kombinasi utang negara yang besar, urgensi mengalihkan anggaran ke riset dan pengembangan pertanian yang mendukung penyuksesan pertanian skala besar nan industrial alias *food estate*, dan adanya kemudahan impor sarana produksi pangan, termasuk pupuk, lewat UU Cipta Kerja, menyediakan momentum yang pas bagi negara untuk menghentikan subsidi pupuk dan menjadikan pupuk sebagai barang yang dijual bebas yang harganya dipengaruhi pasar. Dalam logika ekonomi, ada asumsi bahwa ada ‘peluang’ bagi petani untuk mengakses berbagai pilihan pupuk yang harganya kompetitif. Namun, ini tidak memperhitungkan bahwa akan ada monopoli, oligopoli, dan permainan harga oleh produsen dan distributor yang akan menyebabkan sistem pasar tidak berjalan dengan sehat (FISIPOL UGM, 2020). Petani tetap tidak mandiri, tetap berada dalam kerentanan, dan perusahaan pupuk yang akan lebih diuntungkan dengan skema ini.

Bagaimana dengan Food Estate? Food Estate jelas bukan solusi bagi kedaulatan dan kesejahteraan, apalagi kemandirian petani. Sarana produksi—termasuk pupuk—memang terlihat terjamin (lihat Gambar 1) dengan adanya korporasi petani, tetapi masih ada permasalahan di luar persoalan ketersediaan pupuk; ancaman cengkraman korporasi dalam skema *contract farming*<sup>15</sup> (lihat Gambar 2) dan rencana mengekspor hasil produksi (Gambar 3).



**Gambar 1.** Rantai Nilai Produk dalam Skema Korporasi Petani ood Estate  
Sumber: Presentasi Dr. Husnain MP, M. Sc<sup>16</sup>



**Gambar 2.** Model Bisnis Korporasi Petani. Sumber: Presentasi Dr. Husnain MP, M. Sc



**Gambar 3.** Rancangan Operasional Korporasi Petani.  
Sumber: Presentasi Dr. Husnain MP, M. Sc

Kajian FIAN Indonesia terhadap petani nanas dan jagung di Kediri, yang ditulis oleh Laksmi A. Savitri dkk (2020) telah menemukan bahwa keikutsertaan petani dalam jaringan pangan global bukanlah solusi, malahan akan menaruh mereka dalam kerentanan dan kerugian, ketika rantai pangan global tersebut mengalami disruptsi—misalkan ketika pandemi. Yang menyelamatkan mereka dari kerugian total malahan keberadaan jalur penjualan hasil panen ke pasar lokal.

Oleh sebab itu, mendorong kemandirian petani lewat pertanian lokal dan berkelanjutan semakin mendesak, apalagi dengan semakin masifnya program pemerintah mengintegrasikan petani skala kecil ke dalam skema-skema pertanian berskala besar mengarah pada agro-industri.

## Kesimpulan

Skema Pupuk Bersubsidi menimbulkan kerentanan bagi petani dengan berbagai permasalahannya. Petani dituntut untuk mandiri dan berdaulat dengan sistem pertanian lokal dan berkelanjutan yang akan membuat mereka terlepas dari ancaman kerentanan, yang muncul karena:

1. Rantai nilai yang panjang, kompleks, dan melibatkan banyak institusi, dalam proses pengajuan, penyaluran, dan pendistribusian pupuk. Belum lagi, potensi korupsi, suap, dan penyelewengan yang menyebabkan kelangkaan di tangan petani sebagai *end user*.
2. Kerusakan tanah yang membuat petani terus-terusan berada dalam kebutuhan untuk menyuburkan tanahnya dengan pupuk kimia dari subsidi pemerintah.
3. Solusi di luar skema pupuk bersubsidi, seperti pelibatan petani dalam skema agro-industry seperti Food Estate, atau potensi penjualan pupuk non-subsidi yang harganya diserahkan ke sistem pasar.

Pada akhirnya, pertanian lokal dan berkelanjutan akan meneguhkan kemandirian dan kedaulatan petani dari usaha-usaha pemerintah yang seakan ingin menghilangkan petani skala kecil yang tidak efisien, yang digantikan dengan industri dan pertanian skala besar.

## REFERENSI

Abdulsamad, A., Gereffi, G., Brun, L. C. (2013). Realizing the Potential of African Agriculture: Innovation and Market Access for Smallholder Farmers. *Center on Globalization, Governance, and Competitiveness*. DOI: 10.13140/RG.2.1.1197.3600

Arvitianty, A. (2019, Maret 29). Suap Distribusi Pupuk: Antara DPR, Humpuss, & Pupuk Indonesia. *CNBC Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190329095848-4-63609/suap-distribusi-pupuk-antara-dpr-humpuss-pupuk-indonesia>

Asian Development Bank. (2019). *Policies to Support Investment Requirement of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045*. DOI: <http://dx.doi.org/10.22617/TCS190447-2>

Ashri, A. F. (2021, Januari 6). Alokasi Berkurang, Petani di Cirebon Berebut Pupuk Bersubsidi. *Kompas*. Diakses dari <https://kompas.id/baca/nusantara/2021/01/06/alokasi-berkurang-petani-di-cirebon-berebut-pupuk-bersubsidi/>

Asmara, C. G. (2021, Januari 11). Jokowi Geram Subsidi Pupuk Rp 33 T, Return ke Negara Mana?. *CNBC Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210111101334-17-214931/jokowi-geram-subsidi-pupuk-rp-33-t-return-ke-negara-mana>

Bina Desa. (2016). Pokok-pokok Pertanian Alami. Diakses dari <https://binadesa.org/pokok-pokok-pertanian-alam/>

Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. (2020). Dari Skema "Subsidi Pupuk" ke Skema "Subsidi Pertanian Komprehensif". *Policy Brief* pertama dari analisis kajian Pemetaan Masalah dan Rekomendasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Indonesia.

Friana, H. (2019, Maret 31). Carut-Marut Distribusi Pupuk Subsidi di Balik Kasus Suap Bowo Sidik. *Tirto.id*. Diakses dari <https://tirto.id/carut-marut-distribusi-pupuk-subsidi-di-balik-kasus-suap-bowo-sidik-dkx2>

Kalfagianni, A. dan S. Skordili. (2018). Localizing global food: An introduction. In A. Kalfagianni, & S. Skordili (peny.). *Localizing Global Food: Short Food Supply Chains as Responses to Agri-food System Challenges*. London dan New York: Routledge

Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan. (2018). *Laporan Audit Sosial Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Maros, Luwu Utara, Lombok Utara, Flores Timur, dan Sumba Timur*. Diakses dari <https://kedaulatanpangan.org/audit-sosial-pupuk-bersubsidi/>

Kneafsey, M., Schmutz, U., Balasz, B. and Trenschard, L. (2013). Short food supply chains and local food systems in the EU. A state of play of their socio-economic characteristics. JRC Scientific and Policy Report 06/2013, European Commission, Luxembourg.

KPK. (2017). *Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian*. Diakses melalui <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/litbang/kajian-kebijakan-subsidi-di-bidang-pertanian>

Novika, S. (2021, Januari 13). Terungkap! Ini Sederet Penyebab Harga Pupuk Naik. *DetikFinance*. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5332446/terungkap-ini-sederet-penyebab-harga-pupuk-naik>

PATTIRO-USAID. (2011). *Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk di Indonesia*. Diakses dari <https://repository.pattiro.org/media/844-peta-masalah-pupuk-bersubsidi-di-indones-6f713c60.pdf>

Savitri, L. A., Nurdin, I., Pribadi, D. P., Perkumpulan Kediri Bersama Rakyat. (2020). *Merentankan Yang Rentan: Kajian Awal Tentang Kondisi Petani Kediri dalam Jeratan Rantai Distribusi Pangan Global Semasa Pandemi*. Jakarta: FIAN Indonesia. Diakses dari [https://res.cloudinary.com/mulia/image/upload/v1605511133/PDF%20Files/Dokumen/FIA\\_N\\_Indonesia - Merentankan Yang Rentan.pdf](https://res.cloudinary.com/mulia/image/upload/v1605511133/PDF%20Files/Dokumen/FIA_N_Indonesia - Merentankan Yang Rentan.pdf)

Thomas, V. F. (2021, Januari 14). Amburadulnya Kebijakan Subsidi Pupuk yang Membuat Jokowi Kesal. *Tirto*. Diakses dari <https://tirto.id/amburadulnya-kebijakan-subsidi-pupuk-yang-membuat-jokowi-kesal-f9br>

Udin, Ahmad. (2020, Oktober 11). Petani di Mamuju Menjerit sudah 4 Bulan Pupuk Subsidi Langka. *Merdeka.com*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/petani-di-mamuju-menjerit-sudah-4-bulan-pupuk-subsidi-langka.html>

Uly, Y. A. (2020, Oktober 5). Pemerintah Masih Utang Rp 13,8 Triliun ke Pupuk Indonesia. *Kompas*. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/10/05/142321126/pemerintah-masih-utang-rp-138-triliun-ke-pupuk-indonesia>

Uly, Y. A. (2021, Januari 11). Jengkel Tiap Tahun Subsidi Pupuk Rp 33 Triliun, Jokowi: Tapi Hasilnya Apa?. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/01/11/162306726/jengkel-tiap-tahun-subsidi-pupuk-rp-33-triliun-jokowi-tapi-hasilnya-apa>

---

<sup>1</sup> Dapat dilihat melalui Permentan No. 1/2020, dapat diakses melalui [https://psp.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Permentan\\_01\\_tahun\\_2020.pdf](https://psp.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Permentan_01_tahun_2020.pdf).

<sup>2</sup> Anggaran tahun 2020 untuk pupuk bersubsidi adalah Rp 29,7 triliun. Dari keterangan Sarwo Edhy, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5332446/terungkap-ini-sederet-penyebab-harga-pupuk-naik>. Tahun 2021 ini, alokasi pupuk bersubsidi untuk urea juga berkurang menjadi 20.000 ton, tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada di jumlah 25.000 ton di petani. Diakses dari <https://kompas.id/baca/nusantara/2021/01/06/alokasi-berkurang-petani-di-cirebon-berebut-pupuk-bersubsidi/>

<sup>33</sup> Minus tahun 2020 yang ada di angka Rp 29,7 triliun dan 2021 yang ada di angka Rp 25,7 triliun. Diakses melalui <https://tirto.id/amburadulnya-kebijakan-subsidi-pupuk-yang-membuat-jokowi-kesal-f9br>

<sup>4</sup> Tepatnya sejak tahun 1970-an.

<sup>5</sup> Lihat misalnya berita dari Kompas, "Alokasi Berkurang, Petani di Cirebon Berebut Pupuk Bersubsidi", diakses melalui <https://kompas.id/baca/nusantara/2021/01/06/alokasi-berkurang-petani-di-cirebon-berebut-pupuk-bersubsidi/>, atau berita dari Merdeka, "Petani di Mamuju Menjerit Sudah 4 Bulan Pupuk Subsidi Langka", diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/petani-di-mamuju-menjerit-sudah-4-bulan-pupuk-subsidi-langka.html>

<sup>6</sup> Disampaikan Jokowi dalam pembukaan rapat kerja nasional pembangunan pertanian tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta. Lihat <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210111101334-17-214931/jokowi-geram-subsidi-pupuk-rp-33-t-return-ke-negara-mana>

<sup>7</sup> Proporsi komponen subsidi dalam struktur usaha tanam relatif rendah, di tahun 2011 misalnya, persentase pupuk dan benih dalam keseluruhan struktur ongkos usaha tanam di jomoditas padi, jagung, dan kedelai tidak lebih dari 25%. Namun, karena Nilai Tukar Petani relatif rendah, alokasi subsidi bisa mengurangi biaya tanam petani. Lihat "Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian" oleh KPK, tahun 2017.

<sup>8</sup> Untuk melihat peran dan seperti apa keterlibatan masing-masing institusi tersebut, lihat KPK, (2017), Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian, halaman 11. Diakses melalui <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/litbang/kajian-kebijakan-subsidi-di-bidang-pertanian>

<sup>9</sup> Lihat berita soal suap ini dari berita Tirto.id, "Carut Marut Distribusi Pupuk Subsidi di Balik Kasus Suap Bowo Sidik", diakses melalui <https://tirto.id/carut-marut-distribusi-pupuk-subsidi-di-balik-kasus-suap-bowo-sidik-dkx2> atau dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190329095848-4-63609/suap-distribusi-pupuk-antara-dpr-humpuss-pupuk-indonesia>

<sup>10</sup> Lihat berita dari Kompas.com, "Kementan Terus Perangi Mafia Pupuk untuk Sejahteraan Petani". Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2019/05/28/115248526/kementan-terus-perangi-mafia-pupuk-untuk-sejahteraan-petani?page=all>

<sup>11</sup> Untuk melihat penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, lihat Temuan PATTIRO terkait penyaluran pupuk bersubsidi periode 2009-2011 dalam PATTIRO-USAID, 2011,

<sup>12</sup> Lihat Berita dari Tirto, "Amburadulnya Kebijakan Subsidi Pupuk yang Membuat Jokowi Kesal", diakses dari <https://tirto.id/amburadulnya-kebijakan-subsidi-pupuk-yang-membuat-jokowi-kesal-f9br>

<sup>13</sup> Lihat pernyataan Jokowi dalam berita Kompas, "Jengkel Tiap Tahun Subsidi Pupuk Rp 33 Triliun, Jokowi: Hasilnya Apa?" dari <https://money.kompas.com/read/2021/01/11/162306726/jengkel-tiap-tahun-subsidi-pupuk-rp-33-triliun-jokowi-tapi-hasilnya-apa>

<sup>14</sup> Lihat <https://money.kompas.com/read/2020/10/05/142321126/pemerintah-masih-utang-rp-138-triliun-ke-pupuk-indonesia>

<sup>15</sup> Ini misalkan dapat dilihat dari skema korporasi petani berbasis koperasi yang hanya memberikan keuntungan bagi petani (sebagai worker-owner) sejumlah 5-10% dari laba, sementara investor memperoleh 50% dan builder 20%. Lihat lebih lanjut dalam Grand Design *Pengembangan Korporasi Petani Sebagai Penggerak Ekonomi Kawasan Pertanian Untuk Kesejahteraan Petani*.

<sup>16</sup> Presentasi ini ditampilkan dalam Webinar "Pembangunan Lahan Pertanian Modern Untuk Mewujudkan Food Estate" diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia Badan Kejuruan Teknik Pertanian.